

Jadi Terdakwa Kasus Korupsi, Pejabat di Jabar Masih Jadi Kadis

BANDUNG (IM)- Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Kadisdukcapil) Jawa Barat berinisial DI menjadi terdakwa dalam perkara dugaan korupsi penyalahgunaan dana bantuan sosial (Bansos). Meski sudah jadi terdakwa, DI masih bertugas sebagai Kadis?

Berdasarkan laman SIIP PN Bandung, perkara yang menjerat DI sudah masuk ke persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung. Dengan nomor perkara 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bdg, perkara itu dilimpahkan pada 12 Januari 2022. Sedangkan kasusnya didaftarkan ke Pengadilan Tipikor Bandung pada 17 Januari 2022.

Adapun berdasarkan riwayat perkara pada laman itu, sidang perdana kasus itu sudah berjalan sejak 26 Januari 2022. Sidang tersebut saat ini memasuki agenda eksepsi.

Sementara itu, berdasarkan penelusuran jejak digital pada akun Media Sosial Disdukcapil Jabar, DI sendiri masih mengemban tugasnya sebagai Kepala Dinas meski berstatus terdakwa. Kegiatan-kegiatan yang menghadirkan DI juga diunggah ke medsos.

Kegiatan terakhir yang menampilkan foto DI terlihat saat

pelaksanaan apel pagi hari jadi ke-5 Disdukcapil Jabar pada 31 Januari 2022. Kegiatan itu juga sekaligus pencanangan zona integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBMM).

Bila merujuk pada riwayat perkara, kegiatan apel tersebut status DI sudah menjadi terdakwa bahkan sudah masuk proses persidangan.

Kasipenkom Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat, Dodi Gazali Emil menyebut bila memang terdakwa tidak dilakukan penahanan.

“Tidak ditahan,” kata Dodi saat dikonfirmasi, Jumat (11/2).

Dodi tak menjelaskan secara rinci berkaitan dengan perkara korupsi tersebut. Namun yang pasti, kata Dodi, perkara berkaitan dengan penyalahgunaan dana bantuan sosial (bansos) Pemprov Jabar tahun anggaran 2010 yang digunakan untuk kegiatan tim pemandu haji daerah (IPIHD).

“Kerugian negara sebesar Rp 225 juta,” kata dia.

Perkara ini sendiri sudah disidangkan di Pengadilan Tipikor Bandung. Sidang saat ini masuk ke agenda eksepsi dan akan menghadapi putusan sela pekan depan. ● pur

8 | Nusantara



IDN/ANTARA

HUNIAN SEMENTARA PENYINTAS GUNUNG SEMERU

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (kanan) Bupati Lumajang Thoriqul Haq (kedua kanan) didampingi Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Timur Arum Sabil (kedua kiri) meninjau pembangunan hunian sementara (huntera) di Desa Sumbermujur, Candipuro, Lumajang, Jawa Timur, Jumat (11/2). Kementerian PUPR akan membangun sekitar 600 unit dari 2.000 unit rumah hunian sementara dan hunian tetap bagi penyintas bencana awan panas guguran Gunung Semeru yang ditargetkan selesai sebelum Hari Raya Idul Fitri 2022.

Pemberhentian Pembelajaran Tatap Muka di Kota Bogor Diperpanjang

Selama belum landai, kita tidak akan mengambil risiko dengan membuka kembali sekolah. Ini angkanya meroket tinggi, walaupun kabar baiknya Bed Occupancy Rate (BOR) rumah sakit masih terkendali, kata Wali Kota Bogor, Bima Arya.

BOGOR (IM)- Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor kembali melanjutkan pemberhentian Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di seluruh satuan pendidikan se-Kota Bogor. Selain itu, belum ada opsi mengenai kebijakan PTM di kecamatan

seperti wacana Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, mengatakan PTM di Kota Bogor tidak akan dimulai sebelum kasus Covid-19 di Kota Bogor melandai.

“Selama belum landai, kita

tidak akan mengambil risiko dengan membuka kembali sekolah. Ini angkanya meroket tinggi, walaupun kabar baiknya Bed Occupancy Rate (BOR) rumah sakit masih terkendali,” kata Bima Arya, Jumat (11/2).

Terkait wacana gubernur terkait PTM di setiap kecamatan, Bima Arya mengatakan, Pemkot Bogor akan melakukan observasi terlebih dahulu berdasarkan data-data yang ada. Sebab, hingga hari ini tercatat ada 240 siswa dan tenaga pendidik yang terpapar Covid-19 selama PTM terbatas berlangsung.

Terlebih lagi, sambung dia, pelaksanaan PTM di sekolah-sekolah ada persoalan lintas wilayah. Bima Arya men-

gatakan, belum tentu di satu sekolah siswanya hanya berasal dari satu kecamatan.

“Jadi kita belum merencanakan untuk membuka PTM walaupun dengan konsep kewilayahan tadi, selama lonjakan ini masih tinggi,” tegasnya.

Bima Arya memaparkan, hingga Kamis (10/2), BOR di Kota Bogor mencapai angka 35,3 persen. Setelah sebelumnya tercatat 31 persen beberapa hari sebelumnya.

“Jadi belum bisa dikatakan terkendali. Tinggal kita lihat trennya sudah lebih baik, maka kita akan mungkin melakukan PTM,” ujarnya.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor, Hanafi, mengatakan Kota Bogor mem-

perpanjang pelaksanaan kembali Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di sekolah-sekolah.

Ia menambahkan, turunan aturan tersebut untuk disosialisasikan ke sekolah-sekolah, melalui Surat Edaran (SE) dari Satgas Covid-19 Kota Bogor yang dikeluarkan Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kota Bogor.

“Intinya kita ikuti aturan dari pemerintah pusat melalui instruksi menteri itu. Untuk SE-nya bukan dari Disdik, tapi Satgas Covid-19 Kota Bogor, yang dikeluarkan Bagian Hukum,” ucap Hanafi.

Ia pun berharap kasus Covid-19 di Kota Bogor bisa kembali turun, sehingga pelaksanaan PTM bisa segera kembali dibuka. ● gio

Mayat Perempuan dalam Karung di Cibinong Ternyata ART

CIBINONG (IM)- Polisi mengungkap kasus penemuan mayat perempuan dalam karung di Kampung Pisang, Kelurahan Karadenan, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Korban ternyata seorang asisten rumah tangga (ART) yang dibunuh kekasihnya lantaran cemburu. Kapolres Bogor, AKBP Imam Imanuddin mengungkapkan, korban berinisial SN (25) dihiasi AS (30) dengan cara dibekap dengan bantal, pada Sabtu (5/2). Pembunuhan itu terjadi sesuai keadaannya berhubungan intim di satu kontrakan di wilayah Kelurahan Ciparigi, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor.

Kata Imam, pelaku AS cemburu karena saat mereka tengah memadu kasih, banyak telepon masuk ke ponsel korban. Penelone umumunya laki-laki. Keduanya pun sempat cekcok, hingga akhirnya pelaku membekap korban hingga mati lemas.

“Menurut pengakuan pelaku, korban dibekap menggunakan bantal kurang lebih 10 menit hingga korban kehabisan napas. Ini diperkuat dari

hasil visum, bahwa dokter menyimpulkan korban meninggal karena terganggu jalur pernapasannya,” jelas Imam dalam keterangan persnya, Jumat (11/2).

Setelah korban tewas, pelaku sempat berencana menguburnya di dapur kontrakan tempat mereka bercinta. Sempat menggali dengan menggunakan bor dan sekop, pelaku mengurungkan niatnya.

Korban akhirnya dibungkus pelaku dengan karung. Berbagai barang milik korban juga dimasukkan dalam bungkusannya, hingga menyerupai paket. Pelaku kemudian berencana membuang jasad kekasihnya itu ke sungai. Namun di tengah perjalanan menggunakan sepeda motor, karung berisi mayat SN jatuh. Pelaku tidak kuat mengangkatnya kembali ke atas sepeda motor, hingga ditinggalkan begitu saja.

Pelaku dijerat dengan Pasal 338 dan 340 KUHP dengan ancaman pidana maksimal seumur hidup karena dengan sengaja atau berencana menghilangkan nyawa orang lain. ● gio

IDN/ANTARA



PENCEGAHAN COVID-19 DI PERKANTORAN

Petugas BPBD menyemprotkan disinfektan dengan metode pengasapan (fogging) di lingkungan Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Jumat (11/2). Kegiatan tersebut untuk mencegah penyebaran COVID-19 varian Omicron di lingkungan kantor pemerintahan daerah.

Ganjil Genap Mulai Berlaku di Lima Gerbang Tol Akses Masuk Kota Bandung

BANDUNG (IM)- Polrestabes Bandung mulai memberlakukan sistem ganjil-genap di lima gerbang tol yang merupakan akses masuk ke Kota Bandung dalam rangka menindaklanjuti kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 untuk Bandung Raya.

Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol Aswin Sipayung melalui Kasatlantas Polrestabes Bandung, AKBP Arieq Indra Sentanu mengatakan sistem ganjil-genap itu diberlakukan hanya setiap di akhir pekan mulai dari Jumat, Sabtu, dan Minggu.

“Pemberlakuan ganjil-genap lokasinya yakni GT (Gerbang Tol) Pasteur, GT Pasirkoja, GT Koplo, GT Muhammad Toha, dan GT Buahbatu,” kata Arieq di Polrestabes Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (11/2).

Nantinya kendaraan yang memiliki plat nomor yang tidak sesuai dengan ketentuan ganjil-genap, bakal diputarbalikkan ke arah asalnya. Sehingga sistem tersebut diharapkan dapat membatasi mobilitas masyarakat. Khusus hari Jumat, mulai dari 200 orang

mulai jam 14.00 WIB hingga jam 20.00 WIB. Sedangkan pada Sabtu dan Minggu, ganjil-genap itu menurutnya diberlakukan mulai jam 07.00 WIB hingga 20.00 WIB. “Pembagian personel yang bertugas dibagi dua sif untuk Sabtu dan Minggu, sif pertama dari jam 07.00 WIB hingga 14.00 WIB, sif kedua mulai dari 14.00 WIB hingga 20.00 WIB,” kata dia.

Untuk pelaksanaan sistem tersebut, polisi sudah menyiapkan sejumlah perlengkapan mulai dari water barrier, traffic cone, hingga tenda sebagai pos penjagaan. “Dalam pelaksanaan ganjil-genap, personel yang dilibatkan mulai dari Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), TNI, dan Polri,” kata Arieq.

Sebagai wilayah yang masuk ke dalam aglomerasi Bandung Raya, kini Kota Bandung pun menerapkan kebijakan PPKM Level 3 guna mencegah laju pertumbuhan kasus omicron. Berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Bandung, kini angka kasus aktif Covid-19 sudah mencapai angka 3.372 orang. Dalam sepekan terakhir, angka pertambahan kasus setiap harinya mulai dari 200 orang hingga 700 orang. ● pur

Istri Wabup Pangandaran Jadi Kadis Rawan Konflik Kepentingan

BANDUNG (IM)- Pengangkatan istri Wakil Bupati Pangandaran, Ujang Endin Indrawan, Tini Nurmasari menjadi Kadisnaker menuai sorotan. Pasalnya, pengangkatan tersebut bisa menimbulkan situasi yang rawan dengan konflik kepentingan pribadi dan keluarga.

Guru besar bidang Hukum Tata Negara Universitas Parahyangan (Unpar), Profesor Asep Warlan Yusuf mengatakan, kebijakan pengangkatan istri Ujang bisa menimbulkan polemik. Sebab, dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa pejabat pemerintah dilarang menetapkan keputusan yang berpotensi memiliki konflik kepentingan.

“Di Pasal 43 sampai 45 itu disebutkan konflik kepentingan yang dimaksud salah satunya dilatarbelakangi adanya kepentingan pribadi atau bisnis kemudian hubungan dengan kerabat dan keluarga. Jadi, keputusan di Kabupaten Pangandaran ini memang rawan dengan unsur konflik kepentingan tersebut,” katanya kepada detikcom via telepon di Bandung, Jumat (11/2).

Ia mengungkap, keputusan mengangkat istri Wakil Bupati Pangandaran menjadi kepala dinas nantinya pasti sarat dengan polemik yang mempengaruhi kinerja pemerintahan. Kepala daerah tentunya tidak akan mampu memberi teguran ataupun sanksi evaluasi jika

dinas yang dipimpinya itu secara kinerja tidak memuaskan.

“Karena bagaimana pun kepala dinasnya itu merupakan istri dari wakil bupati di daerah tersebut. Tentu akan ada situasi nantinya serba tidak enak, bahkan mau menegur secara tegas saya kira tidak akan bisa terjadi,” tuturnya.

Namun demikian, Asep menyebut kondisi di Pangandaran ini akan dianggap hal yang wajar jika kepala daerah maupun pejabat pemerintahannya memiliki komitmen kuat memberikan pelayanan kepada publik. Termasuk, melepas semua kepentingan apapun baik kepentingan pribadi maupun keluarga.

“Selama pejabat dan atasan pejabatnya bisa menjamin hal tersebut, memang sah-sah saja. Kan di beberapa daerah juga banyak keluarga yang menduduki posisi strategis, hanya di Pangandaran ini beda situasinya. Harus ada komitmen yang bisa dipertanggungjawabkan yang memang tidak membawa kepentingan keluarga,” ucapnya.

Keputusan ini pun menu-rutnya bisa dibatalkan lewat evaluasi dari kepala daerah. Tapi jika kepala daerah di Pangandaran bisa mempertanggungjawabkan situasi ini tanpa mengganggu jalannya roda pemerintahan, maka tak ada masalah yang perlu dikhawatirkan.

“Tapi kan balik lagi, bagaimanapun ini situasinya

tentu sarat dengan konflik kepentingan. Ini harus dihindari dan kepala daerah sebagai atasan dari wilayah pemerintahan harus bertanggungjawab bilamana keputusannya memang dipastikan tidak memiliki unsur kepentingan apapun,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, Pemkab Pangandaran melantik 4 kepala dinas dan 1 Kepala Badan Pendapatan Daerah. Kelima jabatan tinggi tersebut merupakan hasil lelang jabatan beberapa waktu lalu.

Kelima yang kini Yadi Sukmayadi sebagai Kepala Dinas Kesehatan, Agus Nurdin sebagai Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Kemudian Ling Ling Nugraha Sanjaya sebagai Kepala Dinas PUPR, Tini Nurmasari sebagai Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Dadang Solihat sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah. Tini Nurmasari diketahui berstatus sebagai istri dari Wakil Bupati Pangandaran Ujang Endin Indrawan.

“Mereka yang kini menjabat jabatan tinggi sudah dilakukan melalui proses yang terbuka dengan open bidding beberapa waktu lalu, sebagian sudah dilaksanakan tahun 2021. Adapun yang dilakukan tahun 2022,” kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKSDM) Kabupaten Pangandaran Dani Hamdani. ● pur



IDN/ANTARA

CAPAIAN VAKSINASI BOOSTER DI JAWA BARAT

Petugas medis menuntun vaksin COVID-19 yang digunakan saat pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dosis ketiga (booster) massal di Gedung DPRD Kabupaten Bogor, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Jumat (11/2). Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencatat hingga Selasa (8/2), program vaksinasi COVID-19 dosis ketiga di Jawa Barat mencapai 2,14 persen atau 811.292 orang dari keseluruhan target sasaran sebanyak 37.907.814 orang.